

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN (477374)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Sarolangun - Jambi 36163

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006

e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006

Sarolangun - Jambi 36163

e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sarolangun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sarolangun, 30 Juni 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

JULIADI,S.Kom
NIP.198507012009041003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
A.1. Dasar Hukum.....	22
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun.....	23
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi	25
A.5. Dasar Pengukuran	25
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja.....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
C.1. Aset Lancar	38
C.2. Aset Tetap	40
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	43
C.6. Ekuitas	44
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	45
D.2. Beban Pegawai	45

D.3.	Beban Persediaan	46
D.4.	Beban Barang dan Jasa	46
D.5.	Beban Pemeliharaan	47
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	47
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	48
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	49
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	49
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	50
D.11.	Beban Lain-lain.....	51
D.12.	Kegiatan Non Operasional	51
D.13.	Pos Luar Biasa	52
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	52
E.1.	Ekuitas Awal	52
E.2.	Surplus (defisit) LO	52
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	52
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	53
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	53
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	53
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	53
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	54
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	54
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	55
E.3.	Ekuitas Akhir.....	55
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	55
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	55
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	55
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	60

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2020 dan 2019.....	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020.....	33
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020 dan 2019	33
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020	34
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020.....	35
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019	35
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019	36
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019.....	37
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019.....	37
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.....	38
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	38
Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	39
Tabel 14 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019	39
Tabel 15 Rincian Aset Tetap	40
Tabel 16 Rincian Saldo Tanah	41
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43
Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.....	44
Tabel 19 Rincian nilai peroleksi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020	61
Tabel 20 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	63
Tabel 21 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	64

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Sarolangun

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun - Jambi 36163

Telp. 0745-91006 Fax. 0745-91006 e-mail : sarolangun_pn@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sarolangun, 30 Juni 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

JULIADI,S.Kom
NIP.198507012009041003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.236.564 atau mencapai 49.16 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 2.515.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 1.947.740.346 atau mencapai 51.87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.754.947.000

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020			TA 2019	
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	2.515.000	1.236.564	49.16	2.515.000	1.193.024
Belanja Negara	3.754.947.000	1.947.740.346	51.87	3.095.055.000	1.406.823.948

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 5.783.223.092, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 40.878.600; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 5.742.344.492; dan Aset Lainnya sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 40.000.000, yaitu kewajiban jangka pendek yang terdiri dari Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 0,- dan uang muka dari KPPN sebesar Rp 40.000.000,-.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 5.743.223.092, sehingga jumlah nilai kewajiban dan ekuitas sebesar Rp 5.783.223.092.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	40.878.600	2.042.500	38.836.100	1.901,40
Aset Tetap	5.742.344.492	5.577.058.654	165.285.838	2,96
Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Aset	5.783.223.092	5.579.101.154	204.121.983	3.65
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	40.000.000	8.139.268	31.860.732	177,93
Jumlah Kewajiban	40.000.000	8.139.268	31.860.732	391.44
Ekuitas				
Ekuitas	5.743.223.092	5.570.961.886	172.261.206	3.09
Jumlah Ekuitas Dana	5.743.223.092	5.570.961.886	172.261.206	3.09
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	5.783.223.092	5.579.101.154	204.121.938	3.65

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020, adalah sebesar Rp. 1.236.564, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 1.772.459.039 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (1.771.222.475) dan surplus dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 86.500 sedangkan surplus/defisit dari pos luar biasa sebesar Rp 0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (1.771.135.975).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 5.570.961.886 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (1.771.135.975) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (1.996.500) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 1.945.393.681 dan kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp 172.261.206 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp. 5.743.223.092.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	TA 2020			Realisasi diatas (Bawah) Anggaran
		Anggaran	Realisasi	%	
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.515.000	1.236.564	49.17	(1.278.436)
2.	Hibah	0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		2.515.000	1.236.564	49.17	(1.278.436)
B. BELANJA					
1.	Belanja Pegawai	2.412.267.000	1.204.780.806	49.94	(1.207.486.194)
2.	Belanja Barang	981.300.000	399.849.439	40.75	(581.450.561)
3.	Belanja Modal	361.380.000	342.000.000	94.64	(19.380.000)
Jumlah Belanja Negara		3.754.947.000	1.406.823.948	51.84	(1.808.316.755)
C. PEMBIAYAAN					
1.	Pembiayaan Dalam Negeri	0	0	0.00	0
2.	Pembiayaan Luar Negeri	0	0	0.00	0
Jumlah Belanja Negara		0	0	0.00	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NERACA
PER 30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	Jumlah	%
ASET				
Aset Lancar				
Kas di Bendahara Pengeluaran	40.000.000	0	40.000.000	0.00
Persediaan	2.0461.600	2.042.500	(900)	(0.04)
Persediaan Belum diregister	(1.163.000)	0	(1.163.000)	0.00
Jumlah Aset Lancar	40.878.600	2.042.500	38.836.100	1.901,40
Aset Tetap				
Tanah	699.300.000	699.300.000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2.179.725.504	1.837.725.504	342.000.000	18.60
Gedung dan Bangunan	4.560.293.750	4.560.293.750	0	0.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30.792.000	30.792.000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	47.640.950	47.640.950	0	0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.775.407.712)	(1.598.693.550)	(176.714.162)	11.05
Jumlah Aset Tetap	5.742.344.492	5.577.058.654	165.285.838	2.96
Aset Lainnya				
Aset Lain-lain	323.586.300	323.586.300	0	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(323.586.300)	(323.586.300)	0	0.00
Jumlah Aset Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Aset	5.783.223.092	5.579.101.154	204.121.983	3.65
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	8.139.268	(8.139.268)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	40.000.000	0	40.000.000	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	40.000.00	8.139.268	31.860.732	391.44
Jumlah Kewajiban	40.000.000	8.139.268	31.860.732	391.44
EKUITAS				
Ekuitas Dana Lancar	5.743.223.092	5.570.961.886	172.261.206	3.09
Jumlah Ekuitas Dana	5.743.223.092	5.570.961.886	172.261.206	3.09
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	5.783.223.092	5.579.101.154	204.121.938	3.65

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Kenaikan (Penurunan)			
	30 Juni 2020	30 Juni 2019	Jumlah	%
Kegiatan Operasional				
Pendapatan				
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.236.564	1.192.838	43.726	3.66
Jumlah Pendapatan	1.236.564	1.192.838	43.726	3.66
Beban				
Beban Pegawai	1.204.780.806	1.027.695.824	177.084.982	17.23
Beban Persediaan	14.973.000	17.630.236	(2.657.236)	(15.07)
Beban Barang dan Jasa	229.261.719	192.338.267	36.923.452	19.19
Beban Pemeliharaan	129.178.465	118.911.806	10.266.659	8.63
Beban Perjalanan Dinas	19.547.387	45.551.122	(26.003.735)	(57.08)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	174.717.662	131.904.968	42.812.694	32.45
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0.00
Beban Lain-lain	0	0	0	0.00
Jumlah Beban	1.772.459.039	1.534.032.223	238.426.816	15.54
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.772.459.039)	(1.534.032.223)	(238.426.816)	(15.54)
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0.00
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	86.500	34.286	52.214	152.28
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	86.500	34.286	52.214	152.28
Pos Luar Biasa				
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	0	0	0	0.00
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(1.771.135.975)	(1.532.805.099)	(238.330.876)	(15.54)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 30 JUNI 2020 DAN 2019 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	Jumlah	%
Ekuitas Awal	5.570.961.886	5.548.317.487	22.644.399	0.40
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(1.771.135.975)	(1.532.805.099)	(238.330.876)	15.54
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	(1.996.500)	0	(1.996.500)	0.00
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas				
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	(1.996.500)	0	(1.996.500)	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
Transaksi Antar Entitas	1.945.393.681	1.405.630.924	539.762.7567	38.40
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	172.261.206	(127.174.175)	299.435.381	(235.45)
Ekuitas Akhir	5.743.223.092	5.421.143.312	322.079.780	5.94

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sarolangun

Visi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung. Visi dari Pengadilan Negeri Sarolangun ini sama dengan Visi Mahkamah Agung dan nantinya akan dituangkan kedalam Misi Pengadilan Negeri Sarolangun yang diharapkan dapat mencerminkan Visi dan Misi dari Mahkamah Agung itu sendiri. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun KEGIATAN yang dilakukan adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan indikator kegiatan :

a. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu:

Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Jambi yaitu antara lain Pendaftaran Berkas Perkara; Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara; ATK; Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang; Pengiriman Penetapan Hari Sidang; Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; Konsumsi Sidang Terdakwa; Konsumsi Pengamanan; Minutasi; Penggandaan dan Penjilidan Salinan Putusan Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa Pengiriman Salinan Putusan; Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan; Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan; Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama; Pengiriman Berkas Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama; Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU, Terpidana dan Lapas Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama; Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan PK ;Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa.

b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jambi; Biaya Penyelesaian Perkara ; dan Biaya Eksekusi.

c. Pos Bantuan Hukum

Terdiri dari Pos Bantuan Hukum ; dan Honor Advokat Piket.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Adapun KEGIATAN yang dilakukan adalah Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan indikator kegiatan :

a. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

b. Layanan Perkantoran.

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung

Adapun KEGIATAN yang dilakukan adalah Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dengan indikator kegiatan:

a. Layanan Internal

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

-) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
-) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

-) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

-) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
-) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

-) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
-) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
-) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

-) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
-) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

-) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
-) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
-) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
-) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan

rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

-) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
- Tanah
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
-) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

PENGGOLONGAN MASA MANFAAT ASET TETAP

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

-) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan

diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

-) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

-) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
-) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
-) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
-) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

-) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

-) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
-) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
1. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 2. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
-) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

-) Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara
dan Hibah
: Rp.
1.236.564

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 1.236.564 atau mencapai 49.16 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 2.515.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sarolangun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.515.000	1.236.564	49.16
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Total Pendapatan		2.515.000	1.236.564	49.16

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 43.726 atau 1.74 % persen dibandingkan TA 2019 pada tanggal pelaporan yang sama. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) unit rumah dinas yang disewakan dikarenakan adanya penambahan pegawai yaitu Panitera yang mutasi ke Pengadilan Negeri Sarolangun. Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.236.564	1.192.838	43.726	1.74
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0,00

3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
Total Pendapatan		1.236.564	1.192.838	43.726	1.74

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
1.947.740.
346

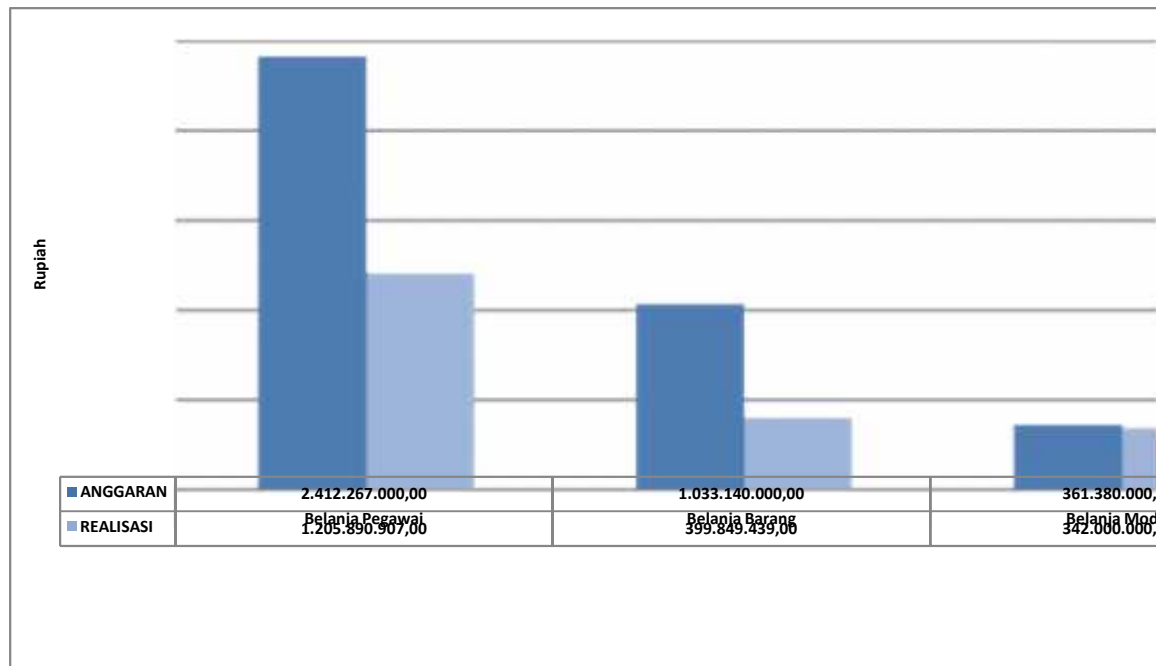
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp. 1.947.740.346 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 45,45 % dari anggaran senilai Rp. 3.806.787.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.412.267.000	1.205.890.907	49.99
Belanja Barang	1.033.140.000	399.849.439	40.75
Belanja Modal	361.380.000	342.000.000	94.64
Total Belanja Bruto	3.806.787.000	1.947.740.346	51.87
Pengembalian Belanja	0	1.110.101	0.00
Total Belanja Netto	3.806.787.000	1.946.630.245	51.14

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2019

Realisasi Belanja Negara pada laporan yang berakhir pada periode 30 Juni 2020 ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 68.532.244 atau sebesar 5,12 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut terjadi pada realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 26.378.075 atau sebesar 2,63 persen dan belanja barang sebesar Rp. 83.151.169 atau 28,18 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.205.890.907	1.028.563.355	177.327.552	14.71
Belanja Barang	399.849.439	378.260.593	21.588.846	5.40
Belanja Modal	342.000.000	0	342.000.000	100.00
Total Belanja	1.947.740.346	1.406.823.948	540.916.398	27.78

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp
1.205.890.
907

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp 1.205.890.907 dan Rp 1.028.563.355. Realisasi Belanja Pegawai TA. 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 177.327.552 atau 14.71 persen dibandingkan Realisasi

Belanja Pegawai TA. 2019 hal ini dikarenakan adanya tambahan pegawai yaitu Hakim sebanyak 6 (orang) yang dilantik pada bulan April 2020. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	497.827.540	456.333.600	41.491.940	8.33
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.081	8.741	340	3.74
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	33.763.630	33.686.304	77.326	0.23
Beban Tunj. Anak PNS	10.241.512	8.901.870	1.339.642	13.08
Beban Tunj. Struktural PNS	14.070.000	14.140.000	(70.000)	(0.49)
Beban Tunj. Fungsional PNS	488.645.000	365.935.000	122.710.000	25.11
Beban Tunj. PPh PNS	45.447.784	40.256.490	5.191.294	11.42
Beban Tunj. Beras PNS	25.926.360	24.394.900	1.531.460	5.90
Beban Uang Makan PNS	81.080.000	73.253.000	7.827.000	9.65
Beban Tunjangan Umum PNS	8.880.000	59.377.000	(50.497.000)	(568.65)
Total Belanja Brutto	1.205.890.907	1.028.564.905	177.326.002	14.70
Pengembalian Belanja	1.110.101	1.550	1.108.551	99.86
Total Belanja Netto	1.204.780.806	1.028.563.355	176.217.451	14.62

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp
399.849.
439

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 399.849.439 dan Rp. 378.260.593

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.588.846 atau 5.40 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan karena semakin efektifnya kegiatan belanja barang di kantor Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menunjang kegiatan-kegiatan operasional kantor sehari-hari.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	196.906.659	143.592.585	53.314.074	27.08
Belanja Barang Persediaan	15.800.600	18.826.000	(3.025.400)	(19.14)
Belanja Jasa	40.494.326	53.063.480	(12.569.154)	(31.04)
Belanja Pemeliharaan	127.100.465	113.417.706	13.682.759	10.76
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	19.547.387	45.551.122	(26.003.735)	(133.02)
Total Belanja Brutto	399.849.439	378.260.593	21.588.846	5.40
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	399.849.439	378.260.593	21.588.846	5.40

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal
:Rp.
342.000.
000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 342.000.000 dan Rp. 0,-

Pada periode ini dapat laporkan bahwa seluruh kegiatan belanja moda pada semester ini telah terealisasi dengan baik, namun adanya sisa anggaran pada belanja modal Kendaraan Dinas Roda 4 karena belanja yang direalisasi dibawah pagu.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	342.000.000	0	342.000.000	100.00
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0		
Total Belanja Brutto	342.000.000	0	342.000.000	100.00
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	342.000.000	0	342.000.000	100.00

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
27.183.000

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 40.878.600 dan Rp. 27.183.000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Kenaikan/Penurunan (Jumlah)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	40.000.000	0	40.000.000	100.00
Persediaan	2.041.600	2.042.500	(900)	(0.04)
Persediaan yang Belum diregister	(1.163.000)	0	(1.163.000)	0.00
Total Aset Lancar	40.878.600	2.042.500	38.836.100	1.901,40

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 40.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	31 Desember TA 2019
1.	Kas Tunai	11.784.330	0
2.	Kas Bank	0	0
3.	Kuitansi UP	28.215.670	0
	Jumlah	40.000.000	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah terdiri dari Uang Persediaan yang dimintakan pada awal tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) . Saldo kas ini terdiri dari saldo kas tunai dan kas bank. Adapun saldo kas tunai sebesar Rp. 11.784.330 dan saldo kas bank sebesar Rp. 0. Adapun kas yang telah digunakan dan belum dipertanggungjawabkan atau telah menjadi kuitansi UP sebesar Rp. 28.215.670,-

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	31 Desember TA 2019
1.	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 2.042.600*

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.041.600 dan Rp. 2.042.500 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	2.041.600	2.042.500
2	Amunisi	0	0

3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		2.041.600	2.042.500

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
5.742.344.492*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji sebesar Rp. 5.742.344.492 dan Rp. 5.577.058.654. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Kenaikan/ Penurunan (Jumlah)	%
1	Tanah	699.300.000	699.300.000	0	0.00
2	Peralatan dan Mesin	2.179.725.504	1.837.725.504	342.000.000	18.60
3	Gedung dan Bangunan	4.560.293.750	4.560.293.750	0	0.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30.792.000	30.792.000	0	0.00
5	Aset Tetap Lainnya	47.640.950	47.640.950	0	0.00
6	Akumulasi Penyusutan	(1.775.407.712)	(1.598.693.550)	(176.714.162)	11.05
Jumlah		5.742.344.492	5.577.058.654	165.285.838	2.96

C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.
699.300.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 699.300.000 dan Rp. 699.300.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	9.458	SHP. No. 26	Pemkab. Sarolangun	Gedung kantor	472.900.000
2.	3	4.528	-	-	Rumah Negara	226.400.000
Jumlah						699.300.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp.
2.179.725.504*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.179.725.504 dan Rp. 1.837.725.504.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	1.837.725.504
Mutasi Tambah	342.000.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	2.179.725.504
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	(1.775.407.712)
Nilai Buku 30 Juni 2020	380.920.035

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp .
4.455.230.750*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.455.230.750 dan Rp. 4.455.230.750.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	4.455.230.750
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	4.455.230.750
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	164.131.423
Nilai Buku 30 Juni 2020	4.291.099.327

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.
33.582.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 33.582.000 dan 33.582.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	30.792.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	30.792.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	33.582.000
Nilai Buku 30 Juni 2020	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp.
47.640.950*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 47.640.950 dan Rp. 47.640.950.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2019	47.640.950
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	47.640.950
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	47.640.950

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(1.443.581.702)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp. (1.775.407.712) dan Rp. (1.598.693.550).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.626.788.314	(1.245.868.279)	380.920.035
2	Gedung dan Bangunan	4.455.230.750	(164.131.423)	4.291.099.327
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	33.582.000	(33.582.000)	0
4	Aset Tetap Lainnya	47.640.950	0	47.640.950
	Jumlah	6.163.242.014	-1.443.581.702	4.719.660.312

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp. 40.000.000

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 8.139.268. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu

kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Sarolangun per 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Uang Muka dari KPPN	40.000.000	0
Utang kepada Pihak Ketiga	0	8.139.268
Jumlah	40.000.000	8.139.268

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp.40.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 40.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp.
5.743.223.092*

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.743.223.092 dan Rp. 5.570.961.886. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2020 terdapat kenaikan nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 172.261.206 (3.09%) dari nilai per 31 Desember TA 2019. Jumlah nilai Kewajiban dan Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 5.743.223.092, sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp. 5.570.961.886.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.
1.236.564*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1.236.564 dan Rp. 1.192.838. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.515.000	1.236.564	49.16
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Total Pendapatan		2.515.000	1.236.564	49.16

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp.
1.204.780.806*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.204.780.806 dan Rp. 1.027.695.824. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	497.827.540	455.559.250		
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.001	8.654		

Beban Tunj. Suami/Istri PNS	33.763.630	33.609.024
Beban Tunj. Anak PNS	10.241.512	8.884.506
Beban Tunj. Struktural PNS	14.070.000	14.140.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	488.645.000	365.935.000
Beban Tunj. PPh PNS	45.447.784	40.256.490
Beban Tunj. Beras PNS	25.926.360	24.394.900
Beban Uang Makan PNS	81.080.000	73.253.000
Beban Tunjangan Umum PNS	7.769.899	11.655.000
Total Beban Pegawai	1.204.780.806	1.027.695.824

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
17.630.235*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.630.235 dan Rp. 22.517.971. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	17.630.236	22.517.971	-4.887.735	-21,71
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	17.630.236	22.517.971	-4.887.735	-21,71

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp.
192.338.267*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 192.338.267 dan Rp. 158.536.567. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	108.292.510	110.456.122	-2.163.612	-1,96
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	949.000	245.000	704.000	287,35
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16.600.000	16.600.000	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	17.751.075	0	17.751.075	100
Beban Bahan	3.809.700	5.987.400	-2.177.700	-36,37
Beban Langganan Listrik	30.860.282	19.807.065	11.053.217	55,80
Beban Langganan Telepon	6.155.500	63.680	6.091.820	9.566,30
Beban Langganan Air	7.206.200	5.197.800	2.008.400	38,64
Beban Jasa Lainnya	714.000	179.500	534.500	297,77
Total Beban Jasa	192.338.267	158.536.567	33.801.700	21,32

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:
Rp. 118.911.806*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 118.911.806 dan Rp. 84.915.946. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	93.096.706	71.916.700	21.180.006	29,45
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.321.000	11.662.020	8.658.980	74,25
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	5.494.100	1.337.226	4.156.874	310,86
Total Beban Pemeliharaan	118.911.806	84.915.946	33.995.860	40,03

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 45.551.122

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 45.551.122 dan Rp. 27.530.000. Beban tersebut

adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	45.551.122	27.530.000	18.021.122	65,46
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	45.551.122	27.530.000	18.021.122	65,46

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin	0	0	0	0

untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda				
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 131.904.968

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 131.904.968 dan Rp. 139.299.540. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	76.981.063	68.224.927	8.756.136	12,83
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	54.923.905	54.283.613	640.292	1,18
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	16.791.000	-16.791.000	-100,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	131.904.968	139.299.540	-7.394.572	-5,31
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	131.904.968	139.299.540	-7.394.572	-5,31

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp. 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0

Panjang				
Total Beban Penyisihan	0	0	0	0
Piutang tak Tertagih				

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 34.286

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan	0	0	0	0
Aset Non Lancar				
Surplus/(Defisit)	0	0	0	0
Penyelesaian Kewajiban				
Jangka Panjang				

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	34.286	464.698	-430.412	-92,62
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	34.286	464.698	-430.412	-92,62

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp. 5.548.317.487

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.548.317.487 dan Rp. 5.566.801.689.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus (defisit) LO : Rp. (1.532.805.099)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1.532.805.099 dan Rp. 2.993.183.192. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset : Rp. 0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan : Rp.
0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap : Rp.
0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 92.563.070.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi : Rp. 0*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain
: Rp. 0*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas : Rp.
1.405.630.924*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.405.630.924 dan Rp. 2.882.136.640.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	1.193.024
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.406.823.948
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	1.405.630.924

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

*Diterima dari
Entitas Lain
(DDEL)/Ditagihk
an ke Entitas
Lain : Rp.
1.193.024 dan
Rp.
1.406.823.948*

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp. 1.193.024 sedangkan DKEL sebesar Rp. 1.406.823.948.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

*Transfer
Masuk/Transfer
Keluar : Rp. 0
dan Rp. 0*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sebesar Rp. 0 dari total Rp. 0 yang diterima sepanjang tahun 2020.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, adalah Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	0
2	ABC	Barang	0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.421.143.312 dan Rp. 5.548.317.487.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Daftar Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK sebagaimana dalam lampiran.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2020 ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sarolangun adalah:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sarolangun A/C 0604-01-000239-30-8 a.n. BPg 159 Pengadilan Negeri Sarolangun yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA satker 477374 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sarolangun A/C 0604-01-000382-30-5 a.n. BPg 159 Pengadilan Negeri Sarolangun yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM satker 477375 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 0.
3. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sarolangun A/C 0604-01-000756-30-0 a.n. RPL 159 PN Sarolangun Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp. 20.856.827.

F.2.4. Revisi DIPA

DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2020, Nomor DIPA-005.01.2.477374/2020 tanggal 05 Desember 2019, Digital Stamp 1365-5008-3248-4726, total pagu Rp. 3.002.055.000, mengalami 3 (tiga) kali revisi DIPA selama semester I tahun 2020 yaitu:

1. Revisi pertama dengan dokumen Nomor DIPA-005.01.2.477374/2020 Revisi ke 01 Tanggal 25 Maret 2020, Digital Stamp 1365-5008-3248-4726. Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu.
2. Revisi ke dua dengan dokumen Nomor DIPA-005.01.2.477374/2020 Revisi ke 02 Tanggal 29 Mei 2020, Digital Stamp 0506-6290-0026-5109. Revisi tersebut merupakan revisi dengan perubahan pagu dari total pagu Rp. 3.002.055.000 menjadi Rp. 3.095.055.000.

3. Revisi ke tiga dengan dokumen Nomor DIPA-005.01.2.477374/2020 Revisi ke 03 Tanggal 30 Juni 2020, Digital Stamp 0506-6290-0026-5109. Revisi tersebut merupakan revisi tanpa perubahan pagu yaitu dengan nilai pagu tetap Rp. 3.095.055.000.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP,SSPB yang dapat dijelaskan pada laporan keuangan pada periode 30 Juni 2020 ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/ PA / SK / XII /2019 tanggal. 03-12-2019 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, Pejabat yang diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun. Dan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Pejabat Sekretaris adalah Juliadi, S. Kom. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : W5-U9/ 19 /KP.00.3/1/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pengadilan Negeri Sarolangun; W5-U9/ 20 /KP.00.3/1/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun; W5-U9/ 136 /KP.00.3/1/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Staf Pengelola Anggaran/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Sarolangun. Melalui Surat Keputusan Sekretaris Nomor : W5-U9/ 21 /KP.00.3/1/2020 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Negara Bukan Pajak Pada Pengadilan Negeri Sarolangun maka nama-nama yang ditunjuk dan diangkat tersebut adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen	: Fitrisia,ST
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM	: Supriadi, SH
Bendahara Pengeluaran	: Mahdalena, A.Md
Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan, PPABP	: Dedek Marinta Barus, SH

Pada bulan Maret 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 226/SEK/Kp.I/SK/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Promosi Dan Mutasi Pejabat Struktural Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung telah terjadi promosi terhadap Kasubbag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang selama ini juga menjabat sebagai Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM sehingga pada tanggal 10 Juni 2020 melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang nomor : W5-U9/ 878 /KP.00.3/6/2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun, maka telah dilakukan penggantian terhadap Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM yaitu:

Semula:

Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM : Supriadi, SH.

Menjadi:

Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM : Binnaria Dabukke, SH.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Sarolangun

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

Kode	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Saldo Awal	Beban Penyusutan	Koreksi	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018
132111	Peralatan dan Mesin	362	1.626.788.314	1.168.887.216	76.981.063	-	1.245.868.279	380.920.035
133111	Gedung dan Bangunan	13	4.455.230.750	109.207.518	54.923.905	-	164.131.423	4.291.099.327
134111	Jalan dan Jembatan	1	33.582.000	33.582.000	-	-	33.582.000	-
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	141	323.586.300	323.586.300	0	0	323.586.300	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						1.443.581.702	
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						1.767.168.002	

*B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG
BERUPA UANG/BARANG/JASA*

Pengadilan Negeri Sarolangun

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		N I H I L					
			Jumlah :				

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas Lapo

Kuan

005

01

1000

477374

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2020

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT